

## DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W.S., Albrecht, C.O., 2003. *Fraud Examination*. South-Western, Thomson Learning, U.S.A
- Bahari, A., Umam, K., 2009. *KPK—Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hennink, M., Hutter, I., dan Bailey, A. 2011. *Qualitative Research Methods*. London: Sage Publications Ltd.
- Hopwood, W.S., Leiner, J.J., Young, G.R., 2008. *Forensic Accounting*. McGraw-Hill/Irwin Inc., New York.
- <http://www.bpkp.go.id/diy.bpkp>. Di akses 21 Januari 2016 Pukul 16.18.
- Huber, W.D., 2014. *Forensic Accounting: An Anglo-American Comparison—Forensic Accounting in the U.S.A*. Journal of Forensic & Investigative Accounting Vol.6, Issue 3, Special International Issue.
- Indonesia Corruption Watch., 2014. *Hasil Penelitian: Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*. Policy Paper, Jakarta.
- Makawimbang, H.F., 2014. *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Thafa Media, Yogyakarta.
- Partohap, T.H., 2015. *Anti-corruption Agency and Increasing Punishments: Evidence from Court's Decision in Indonesia*. Journal of Economic Literature Classifications C41, D73, K42.
- Partohap, T.H., Pradiptyo, R., 2015. *Who Cares of Anti Corruption Agency? An Assessment of Court Decisions for Corruption Cases in Indonesia Using Proportional Hazard Model*. Journal of Economic Literature Classifications C41, D73, K42.
- Pradiptyo, R. 2012. *Does Corruption Pay In Indonesia? If So, Who are Benefited the Most?* Munich Personal RePEc Archive Paper No.41384.
- Republik Indonesia., 2001. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- \_\_\_\_\_, 2008. Keputusan BPK-RI Nomor 17/K/I-XIII.2/12/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Kelapa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- \_\_\_\_\_, 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- \_\_\_\_\_, 2001. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- \_\_\_\_\_, 2007. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- \_\_\_\_\_, 2014. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- \_\_\_\_\_, 1981. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- \_\_\_\_\_, 1999. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- \_\_\_\_\_, 2002. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- \_\_\_\_\_, 2002. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- \_\_\_\_\_, 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- \_\_\_\_\_, 2004. Keputusan Presiden Nomor 09 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001.

- \_\_\_\_\_, 2004. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara.
- \_\_\_\_\_, 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- \_\_\_\_\_, 2004. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang  
Kejaksaan Republik Indonesia
- \_\_\_\_\_, 2006. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang  
Badan Pemeriksa Keuangan.
- \_\_\_\_\_, 2012. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-  
X/2012.
- \_\_\_\_\_, 2014. Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor  
11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk.
- \_\_\_\_\_, 2014. Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor  
14/Pid.Sus- TPK/2014/PN.Yyk.
- \_\_\_\_\_, 2014. Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor  
19/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk.
- Riadhussyah, M., 2014. *Peranan BPKP Menghitung Kerugian Keuangan Negara  
dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi di  
Kota Mataram)*. Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram.
- Singleton, T.W., Singleton, A.J., 2010. *Fraud Auditing and Forensic Accounting*.  
Fourth Edition. John Willey & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
- Sugiyono., 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Tuanakotta, T.M. 2009. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak  
Pidana Korupsi*. Salemba Empat, Jakarta.
- Tuanakotta, T.M., 2012. *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Salemba Empat,  
Jakarta.
- Waluyo, Bambang., 2011. *Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi*. Sinar  
Grafika, Jakarta.
- Yin, R.K., 2014. *Case Study Research: Design and Methods*. SAGE Publication.,  
Inc. U.S.A